BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum tercantum pada Undang-undang 1945 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3, hal ini dapat diartikan bahwa setiap melakukan sesuatu serta dalam menyelenggarakan sesuatu harus berdasarkan hukum. Oleh karena itu, untuk membatasi adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat dicetuskan ide dilahirkannya negara hukum.¹ Indonesia disebutkan sebagai negara hukum, karena mempunyai suatu karakteristik yang mandiri maksud kemandirian disini terlihat dari adanya penerapan suatu konsep yang dianut oleh Negara Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila landasan pokok dan *fundamental* (mendasar) dalam hal penyelenggaraan untuk mewujudkan kehidupan yang aman sejahtera, tentram, dan tertib serta terwujudnya hukum yang baik serta adil tanpa adanya perbedaan antara satu sama lain. Adanya kesetaraan terhadap keadilan yang diberikan bertujuan untuk memenuhi bentuk perlindungan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum maka hukum mempunyai fungsi sebagai alat negara yang mempunyai tujuan untuk memberikan rasa tentram serta aman serta tercapainya suatu keadilan serta keseimbangan antara

¹Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Bantul, 2013, hlm.1.

hak dan kewajiban, berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan kedudukan dihadapan hukum.²

Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisikan tentang perintah serta larangan. Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapat perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Setiap warga Negara Indonesia dihadapan hukum mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dan tidak dibeda-bedakan pemberlakuannya. Setiap manusia yang hidup mempunyai hak dasar yaitu Hak Asasi Manusia hak yang bersifat universal, yang dimana harus dilindungi serta dihormati, dan tidak boleh diabaikan serta di rampas oleh siapapun. Pada pasal 28 D ayat (1) Undang-undang 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

²Monika Dwi Putri dan Kabib Nawawi, *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tanangan dan Permasalahan)*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.1 No 1, 2020, hlm. 82. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>. Diakses Pada Hari Jumat 8 Januari 2021.

Pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang 1945 terkait dengan perlindungan korban disabilitas di hadapan hukum yang menjadi dasar konstitusional yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas harus dilindungi serta mendapat perlindungan di hadapan hukum, walaupun keadaan fisik penyandang disabilitas tidak sempurna baik fisik maupun psikisnya penyandang disabilitas harus dilindungi. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada Pasal 5 ayat (3) yaitu: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususan”.

Dapat dijelaskan maksud dari Pasal 5 ayat (3) tersebut bahwa kaum penyandang disabilitas tersebut mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya yaitu mendapatkan perlindungan yang sama dihadapan hukum, yang berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum serta menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang orang tersebut, khususnya pada penyandang berkebutuhan khusus. Namun pada kenyataannya kaum disabilitas lah yang menjadi kelompok masyarakat rentan korban tindak kejahatan.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa :

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Pengertian disabilitas berasal dari kata bahas Inggris yaitu “*disability*” atau “*disabilities*” yang dapat diartikan penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan

untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat dipastikan berdampak pada aktivitas keseharian mereka dalam menjalani kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Ragam penyandang disabilitas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual
- c. Penyandang Disabilitas Mental dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Bagaimanapun bentuk fisik dan tidak normalnya bentuk serta keadaan penyandang disabilitas tersebut negara berkewajiban melindungi hak-hak para penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang dimana korban mempunyai posisi yang tidak seimbang dengan pelaku, biasanya pelaku mempunyai kekuasaan fisik.⁴ Penyandang disabilitas sendiri dianggap rentan terhadap tindak pidana serta perempuan juga dianggap lemah terhadap tindak pidana, Perempuan sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai seorang perempuan, banyak hasil penelitian dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang, menunjukkan

³Muhammad Bayu Saputro, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 10 No. 1, 2020, hlm. 74. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/10527>. Diakses pada hari Sabtu 12 Desember 2020.

⁴Lusia Palulungan, M Ghufrani H. Kordi K, Muh. Taufan Ramli, *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan dan Kesetaraan*, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, Makassar, 2017, hlm.120.

bagaimana lemahnya posisi perempuan ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya.⁵ Apalagi jika tindak pidana perkosaan tersebut yang korbannya merupakan seorang perempuan penyandang disabilitas yang seringkali menjadi sasaran dari tindakan pidana perkosaan, penyandang disabilitas memiliki kecenderungan 4 sampai dengan 10 kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan non disabilitas.⁶ Walaupun keadaan fisik penyandang disabilitas tidak sempurna baik fisik maupun psikisnya penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan yang layak. Namun dalam prakteknya perlindungan disabilitas masih belum terealisasi dengan baik. Hal ini di akibatkan karena terbatasnya serta minimnya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang kaum penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dimana penyandang disabilitas tersebut menjadi korban dari kejahatan, sehingga penerapan hukum yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang disamakan dengan orang non-disabilitas.⁷ Maka dari itu harusnya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan khususnya perempuan penyandang disabilitas harusnya mendapatkan perlindungan yang lebih diperhatikan lagi dihadapan hukum.

⁵Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, *Kekerasan dalam Pernikahan Sirih: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)*, PAMPAS : Journal of Criminal Law, vol. 1 No. 1, 2020, hlm.56. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8278>. Diakses pada hari Sabtu 20 Februari 2021.

⁶Supriyandi Widodo E dan Ajeng Gandi Kamilah, *Aspek-aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta, ICJR, 2015, hlm. 9.

⁷Puguh Ari Wijayanto, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel sebagai Korban Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2013, hlm. 8. <http://e-journal.uajy.ac.id/4949/>. Diakses pada hari Jumat 1 Januari 2021.

Kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah terdapat seorang perempuan (berinisial M) yang telah diperkosa oleh seorang laki-laki (berinisial H A). Korban dari tindak pidana perkosaan tersebut merupakan seorang perempuan penyandang disabilitas, dimana korban mengalami gangguan dalam berbicara serta berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan majelis hakim telah menyimpulkan bahwa saksi korban dari tindak pidana perkosaan ini adalah seorang penyandang disabilitas penderita Tunarungu dan Tuna Wicara. Dalam kasus ini perlindungan hukum terhadap disabilitas masih belum terlaksana dengan baik hal ini diakibatkan karena terbatasnya serta minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan terhadap korban penyandang disabilitas korban dari tindak pidana perkosaan. Didalam Undang-undang khusus penyandang disabilitas yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 hanya memberikan penjelasan mengenai hak-hak penyandang disabilitas secara umum dan garis besar, tidak secara spesifik untuk mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat 3 penyandang disabilitas mempunyai hak yaitu “untuk mendapatkan perlindungan khusus dari deskriminasi, penelantaran, pelecehan, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

Dalam rangka untuk mewujudkan suatu kesamaan hak tanpa adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas, pemerintah hendak memberikan sebuah bentuk penekanan, yaitu Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi dan dilindungi secara hukum.

Berikut beberapa contoh pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

- a. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan “Penyandang Disabilitas berhak diberikan perlindungan khusus meliputi hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual.”
- b. Pasal 9 menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.”
- c. Pasal 30 ayat (1) Penyandang Disabilitas, menyebutkan “Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas.”
- d. Pasal 36 berbunyi, “Lembaga Penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.”

Sejauh ini pemerintah masih belum mampu membuat sebuah bentuk pengaturan untuk mengakomodasi baik secara prosedural bagi penyandang disabilitas. Pemerintah sepatutnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berperan aktif termasuk sebagai korban dan saksi, untuk mendapatkan pedampingan atau penerjemah, mendapat fasilitas yang aksesibel dalam bentuk ketersediaan sebuah alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses persidangan, dimulai dari tahap penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya. Selain itu, langkah lebih efektifnya apabila pengaturan mengenai

aspek criminal justice yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dapat berjalan searah dengan ketentuan RKUHAP atau setidaknya, apabila RKUHAP masih belum dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas, seharusnya pengaturan UU Penyandang Disabilitas sebagai *lex specialis* dapat lebih progresif dalam menghadirkan terobosan untuk melengkapi apa yang tidak dapat dijangkau oleh RKUHAP.

Dalam proses penyelesaian perkara seharusnya korban mendapatkan hak- hak yaitu: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa oleh penyidik, jaksa serta hakim yang faham mengenai disabilitas. Tetapi di dalam kasus ini ada beberapa hak korban yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, serta hak untuk mendapatkan ahli.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (studi kasus putusan No.25/pid.B/2017/Mbn).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi ini nantinya, maka penulisan, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan dalam persidangan ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk korban penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan dalam putusan nomor. 25/Pid.B/2017/Mbn ditinjau dari aspek keadilan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan dan diharapkannya adanya aturan khusus yang mengatur tentang penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan.
- b. Untuk memperjelas kekaburan hukum yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan di pengadilan sehingga kedepannya tidak ada lagi kekeliruan di dalam aturan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari sudut pandang teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang dimana memberikan pencerahan dalam bidang hukum pidana terkait dengan perlindungan korban tindak pidana perkosaan yang dimana korban tersebut merupakan penyandang disabilitas.
- b. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, serta masyarakat

yang membutuhkan informasi, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikan sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikn defenisi-defenisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

2. Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

3. Korban

Menurut Arif Gosita (1996) Korban merupakan mereka yang menderita baik jasmaniah serta rohaniah sebagai akibat dari adanya tindakan orang lain, serta seseorang mencari pemenuhan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁹

4. Tindak Pidana

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (element van schuld) dalam arti kata “bertanggung jawab”.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu ada yang berupa unsur subjektif berupa kesalahan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “ tiada pidana tanpa kesalahan”, karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah

⁹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1996, hlm.3.

¹⁰E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 206.

melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.¹¹

5. Perkosaan

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar.¹²

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat, namun harus dijadikan problem public karena ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang melanggar HAM, juga mengakibatkan penderitaan fisik, social, maupun psikologis bagi kaum perempuan.¹³ Terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan criminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, sedangkan faktor ekstern yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan serta film.¹⁴

¹¹Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, Dan penerapannya*. Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 3.

¹²Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Mazuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25.

¹³Ni Made Dwi Kristian, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, vol. 7 No. 3, 2014, hlm. 374. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940>. Diakses pada Selasa 20 Oktober 2020.

¹⁴Abdulsyani, *Sosiologis Krimina-litas*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan, dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengonstruksikan keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif.

Oleh karena obyek masalah yang diteliti dalam proposal ini mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan No.25/Pid.B/2017/Mbn)”. Maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian proposal skripsi adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan dari Salmond, Teori perlindungan hukum merupakan bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang

¹⁵Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 55.

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum

2. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Sudarto, penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁶ Secara konseptual arti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatannya menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaianpenjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Penegakkan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakkan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarajatan terpidana.¹⁸

F. Metode Penelitian

¹⁶Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 32.

¹⁷Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 5.

¹⁸Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam proposal skripsi ini dapat dijelaskan sebagaiberikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian skripsi ini berbentuk penelitian deskriptif atau deskripsi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang rinci tentang objek yang diteliti, yaitu perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan (studi kasus putusan No.25/Pid.B/2017/Mbn).

2. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Fokus kajiannya adalah hukum positif.

Hukum positif yang dimaksudkan disini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tersebut yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan :

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81.

- a) “Pendekatan Undang-undang atau *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dilakukan dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”²⁰
- b) Pendekatan kasus atau *Case Approach*, yaitu pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
- c) Pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach*, yaitu penelitian terhadap terhadap konsep hukum; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cet ke 7, Jakarta, 2011, hlm. 92.

- c) Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Bahan Hukum

- a) Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang dibahas.
- b) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c) Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab, masing-masing bab ini terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan berfikir bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II :TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum Tentang perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan, yang berisikan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas, yang berisikan tentang ragam penyandang disabilitas.tinjauan umum tentang korban, yang berisikan tentang tipe-tipe korban serta hak-hak korban. Tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan yang berisikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian perkosaan, ragam perkosaan, serta pembuktian tindak pidana perkosaan.

BAB III: PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Nomor 25/pid.B/2017/Mbn Tentang Tindak Pidana Perkosaan terhadap penyandang disabilitas. Dalam bab ini dibahas mengenai aturan hukum yang mengatur secara spesifik tentang korban penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan, serta bentuk perlindungan hukum untuk korban penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan di dalam putusan Nomor 25/Pid.B/217/Mbn.

BAB IV :PENUTUP

Penutup Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.